

LITERATUR REVIEW: MENGUKUR KINERJA SEKTOR PUBLIK MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY

Aulia Nurfaulziyyah¹, Nayla Radita Putri², Putri Anisa Nuraini³, Rinny Meidiyustiani⁴

aulia.nrfzyyh@gmail.com¹, naylaraditaputri03@gmail.com²,
putriaannisa0501@gmail.com³, rinny.meidiyustiani@budiluhur.ac.id⁴

Universitas Budi Luhur

ABSTRACT

The purpose of this study is to see how the Value for Money (VFM) approach is applied in assessing public sector performance in Indonesia. To ensure that public budget management produces optimal benefits for society, the VFM framework consists of three main components: Economy, Efficiency, and Effectiveness. Ten (10) empirical studies published between 2021 and 2025 are the subject of this research, using a qualitative descriptive approach. The studies show that although VFM principles have been applied successfully in some regions, many regions still face problems with budget efficiency. The main challenges are poor planning, few results-based performance indicators, and lack of transparency and accountability. The study suggests regular evaluation, government capacity building, and incorporation of social and environmental aspects into performance measurement. By consistently applying VFM principles, it is expected that the quality of public services, budget accountability, and governance will be more focused on improving society.

Keywords: Value For Money, Public Sector Performance, Effectiveness, Efficiency, Economy, Fiscal Accountability.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan pendekatan Value for Money (VFM) dalam menilai kinerja sektor publik di Indonesia. Untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran publik menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat, kerangka kerja Vfm terdiri dari tiga komponen utama: Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. Terdapat 10 (sepuluh) studi empiris yang diterbitkan antara tahun 2021 dan 2025 menjadi subjek penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip Vfm telah diterapkan dengan sukses di beberapa daerah, tetapi masih banyak daerah masih menghadapi masalah dengan efisiensi anggaran. Tantangan utama dari penelitian ini yaitu adanya perencanaan yang buruk, sedikit indikator kinerja berbasis hasil, dan ketidakjelasan dari transparansi dan akuntabilitas. Studi ini menyarankan evaluasi berkala, peningkatan kemampuan pemerintah, dan penggabungan aspek sosial dan lingkungan ke dalam pengukuran kinerja. Dengan menerapkan prinsip VFM secara konsisten, diharapkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas anggaran, dan tata kelola pemerintahan lebih berfokus pada peningkatan masyarakat.

Kata kunci: Value For Money, Kinerja Sektor Publik, Efektivitas, Efisiensi, Ekonomi, Akuntabilitas Fiskal.

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan aspek yang cukup penting dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengeluaran publik memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sektor publik di Indonesia menghadapi masalah besar dalam hal efisiensi dan transparansi anggaran. Oleh karena itu, pendekatan Value for Money (VFM) yang mengedepankan tiga komponen utama: ekonomis, efektif, dan efisien ini menjadi relevan untuk menilai seberapa efektif anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengertian dari Ekonomi yaitu memperoleh barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga serendah mungkin. Efisiensi yaitu kemampuan untuk menghasilkan output

sebanyak mungkin dengan jumlah input yang paling sedikit. Efisiensi merupakan rasio keluaran terhadap masukan dalam kaitannya dengan standar atau sasaran kinerja. Efektivitas adalah sejauh mana hasil program dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa efektif suatu hal adalah dengan membandingkan hasil dan keluarannya (Sitorus & Siregar, 2023)

Menurut (Mardiasmo, 2021), nilai uang dalam sektor publik mengacu pada penggunaan dana publik dengan cara yang hemat dan tidak boros serta memastikan bahwa dana tersebut mampu menghasilkan manfaat terbaik bagi masyarakat. Dalam pendekatan ini, ekonomi mengacu pada cara perusahaan memperoleh input dengan harga dan kualitas terbaik, sedangkan efisiensi mengacu pada bagaimana sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan output, dan Efektivitas lebih mengacu pada bagaimana output mencapai tujuan.

Meskipun metode ini telah banyak digunakan, Indonesia masih memiliki kesenjangan dalam hal bagaimana mengukur kinerja sektor publik. (Matondang et al., 2025) menunjukkan bahwa, meskipun VFM telah diterapkan di Kabupaten Dairi, ada perbedaan yang signifikan antara implementasi program yang berdampak sosial dan perencanaan anggaran. Ini menunjukkan betapa pentingnya menggabungkan aspek sosial dan lingkungan ketika mengevaluasi VFM. (Akyani, 2024) juga mengatakan bahwa meskipun metode ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah, pengukuran dampak sosial masih kurang diperhatikan. Akibatnya, hasil yang diharapkan tidak sejalan dengan apa yang terjadi. (Wulansari, 2016) menunjukkan bahwa meskipun metode VFM efektif untuk mengukur kinerja anggaran di sektor keluarga berencana, tetapi masih perlu ada peningkatan untuk mengukur hasil masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah saat ini tidak sepenuhnya mengerti konsep Value for Money (VfM), yang berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Akibatnya, terjadi pemborosan sumber daya serta rendahnya efektivitas dalam penggunaan anggaran di berbagai sektor publik. (Budiyanto, 2012) mencatat bahwa penerapan VfM dalam sektor publik, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, masih menghadapi banyak rintangan. Ia menyoroti bahwa pemerintah belum memanfaatkan sepenuhnya prinsip VfM, yang menekankan pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk mengatasi masalah ini, Budianto menyarankan agar dilakukan pelatihan berkelanjutan untuk pegawai negeri dan pengembangan indikator kinerja berbasis hasil yang lebih standar, sehingga penerapan VfM bisa lebih maksimal dan memberi pengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana metode Value for Money (VFM) dapat diterapkan untuk menilai kinerja sektor publik dan mengisi celah yang ada dengan menawarkan pendekatan pengukuran yang lebih menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya publik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Melalui analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana VFM dapat meningkatkan kinerja sektor publik secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, tujuan penelitian ini adalah untuk menambah literatur mengenai penerapan Value for Money (VFM) dengan melihat dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk dampak sosial dan lingkungan yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam banyak studi sebelumnya. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih ramah lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode literatur review atau kajian pustaka dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana Value for Money dapat digunakan dalam menilai kinerja sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menjelaskan konsep, prinsip, dan praktik Value for Money dalam pengukuran kinerja sektor publik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran literatur menggunakan kata kunci seperti value for money, public sector performance, efficiency, economy, effectiveness, dan performance measurement in public administration melalui basis data akademik seperti Google Scholar. Untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan adalah aktual dan relevan dengan situasi saat ini, penelitian literatur yang digunakan sebagai bahan penelitian akan dibatasi pada publikasi yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Metode analisis isi (content analysis) digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Metode isi ini mengidentifikasi dan mensintesis berbagai konsep dan hasil dari studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pendekatan Value for Money digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi dalam pelaksanaan program dan layanan publik bagi masyarakat.

No.	Author	Judul	Temuan
1	Khairani Matondang, Aqilah Apritia Parawanza, Jemelly Prisya Simanjuntak, Yolanda Tampubolon (2025)	Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Value For Money</i> di Kabupaten Dairi Pada Tahun 2023 dan 2024	Hasil analisis kriteria ekonomi menunjukkan bahwa kriteria tahun 2023 dan 2024 termasuk dalam kriteria ekonomi karena hasil rasionya lebih dari 100%, sedangkan kriteria efisiensi tahun 2023 dan 2024 termasuk dalam kriteria tidak efisien karena hasil rasionya kurang dari 100% dan kriteria tahun 2023 dan 2024 termasuk dalam kriteria ekonomi karena hasil rasionya kurang dari 100%.
2.	Anita, Nirwana, Darmawati (2025).	Analisis Kinerja Pemerintah Kabupaten Sinjai Menggunakan Value for Money	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai berkinerja ekonomis, dengan anggaran yang direncanakan lebih rendah daripada yang terealisasi. Namun, dari segi efisiensi, kinerja pemerintah pada tahun 2021 dan 2023 dianggap tidak efisien karena pengeluaran melampaui pendapatan, sementara pada tahun 2022, pemerintah berhasil mencapai efisiensi dengan pengeluaran

			yang lebih rendah dari pendapatan. Dari segi efektivitas, pemerintah dianggap tidak efektif karena tidak berhasil mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan pada setiap tahun yang dianalisis.
3.	Agustin Sri Lestasi, Rukmini, Wikan Budi Utami (2024).	Analisis Pengaruh Efektivitas, Efisiensi, dan Transparansi Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Polanharjo	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa variabel efektivitas mempengaruhi kinerja pemerintah desa secara signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikan penelitian 0,001, yang lebih rendah dari $\alpha = 0,05$; variabel efisiensi juga mempengaruhi kinerja pemerintah desa secara signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,000, yang lebih rendah dari $\alpha = 0,05$. Kinerja administrasi desa juga dipengaruhi secara signifikan oleh variabel. Ini menunjukkan bahwa variabel kinerja pemerintah dipengaruhi oleh efektivitas, efisiensi, dan transparansi baik secara bersamaan maupun secara terpisah.
4.	Komang Bintang Rosita Dewi, Desak Nyoman Sri Werastut (2024).	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Melalui Pengukuran Value for Money untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari: akuntabilitas kinerja, value for money, pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. <i>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika</i> , 14(3), 385-401.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Lokasari mampu memaksimalkan kinerja keuangan nya dalam uji akuntabilitas. Namun, dalam pengukuran <i>Value for Money</i> , pemerintah desa harus selalu merencanakan dan memantau penggunaan anggaran agar tidak melebihi anggaran.
5.	Wakhid Yuliyanto, Sri Wahyuningsih, Rizki Kurniasih, Ari Waluyo (2023).	Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan “ <i>Value for Money</i> ” Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas ‘X’ di Sektor Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas “X” di sektor publik memiliki kinerja keuangan yang ekonomis, target, dan realisasi anggaran tahun 2020-2021. Penggunaan anggaran langsung dan tidak

			langsung yang “efektif” menunjukkan bahwa belanja langsung “sangat efisien” sedangkan belanja tidak langsung “efisien”. Secara umum, peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya belum menghasilkan kinerja yang lebih baik seperti yang ditunjukkan oleh penurunan persentase sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kinerja dari sisi kuantitas-kualitas di masa mendatang.
6.	Melta Indrika, Novi Mubyanto, Efni Anita (2023).	Analisis Pengukuran <i>Value for Money</i> Pada APBDes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Sungai Bengkal Barat dari segi ekonomi pada tahun 2018, 2019 dan 2021 adalah ekonomis, sedangkan tahun 2020 dianggap tidak ekonomis; kinerja keuangan Desa Sungai Bengkal Barat dari segi efisiensi pada tahun 2018, 2019, dan 2021 adalah efisiensi, sedangkan tahun 2020 dianggap tidak efisiensi; dan kinerja keuangan Desa Sungai Bengkal Barat dari segi efisiensi pada tahun 2018, 2019, dan 2021 adalah efisiensi
7.	Indah Putri Nurafifah, Haliah, Nirwana (2022)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Value For Money</i> (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Nabire gagal memenuhi konsep <i>Value for Money</i> karena rasio ekonomi melebihi 100% pada tahun 2019 dan 2021, yang berarti belanja melebihi anggaran, Tingkat efisiensi juga melebihi 100% pada tahun 2019, yang berarti belanja melebihi pendapatan, dan rasio ekonomi kurang dari 100% pada tahun 2019 dan 2020, yang berarti belanja melebihi pendapatan.
8.	Thessa Regisof Mega Wahiji,	Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen ekonomi

	Herman Katamory, Peter M. Kapojos (2022)	Menggunakan Pendekatan <i>Value For Money</i> Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo	pengukuran ekonomi 2018-2020 dinyatakan ekonomis, elemen efisiensi pengukuran ekonomi 2018-2020 dinyatakan efisien, dan elemen efektivitas pengukuran kinerja 2018-2020 dinyatakan efektif. Nilai dari analisis pengukuran kinerja pada lembaga pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo adalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua program dan inisiatif yang dimilikinya.
9.	Yunita, Maharani dan Rafika Sari (2021)	Konsep <i>Value For Money</i> untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang	Penelitian ini menggunakan studi deskriptif yang menganalisis laporan perkembangan keimigrasian di Pangkalpinang dari tahun 2019 hingga 2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja kantor imigrasi saat ini: 1) ekonomis dengan rasio ekonomi rata-rata di bawah 100%; 2) efisien dengan rasio efisiensi rata-rata di bawah 100%; dan 3) efektif dengan rasio efektivitas rata-rata di bawah 100%. Dengan demikian, pemerintahan yang baik dapat terwujud di kantor imigrasi jika dilihat berdasarkan perhitungan berdasarkan konsep <i>Value for Money</i> .
10.	Yolandha Aisyah Hadaryen, Endro Sugiartono (2021)	Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa dengan Menggunakan Konsep <i>Value for Money</i> (Studi kasus pada Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dari tahun 2017 hingga 2020 dinilai sebagai berikut: pengukuran ekonomis pada tahun 2017 tidak ekonomis, pengukuran efisiensi pada tahun 2017 berimbang, pengukuran

			efisiensi pada tahun 2018 berimbang, pengukuran efektivitas pada tahun 2017 efektif, pengukuran efektivitas pada tahun 2018 efektif, dan pengukuran efektivitas pada tahun 2020 efektif.
--	--	--	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Value for Money (VfM) digunakan untuk mengevaluasi kinerja sektor publik, dengan tujuan memastikan bahwa penggunaan sumber daya oleh pemerintah menghasilkan hasil yang optimal dalam hal efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Value for Money (VfM) menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengeluaran anggaran pemerintah dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, serta apakah penggunaan anggaran tersebut dilakukan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Berdasarkan 10 temuan yang telah ditelaah, implementasi Value for Money (VfM) memberikan wawasan jelas mengenai bagaimana sektor publik mengelola anggarannya, dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dalam pengelolaan anggaran pemerintah di berbagai daerah.

Salah satu kontribusi yang signifikan dari penelitian ini adalah bagaimana penelitian ini dapat mengisi kekosongan dalam literatur yang ada mengenai penerapan pendekatan Value for Money (VfM) dalam sektor publik. Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek ekonomi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, namun jarang yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari pengeluaran anggaran publik. Meskipun banyak daerah yang telah menerapkan metode VFM, seperti yang tercermin dalam penelitian (Matondang et al., 2025) dan (Anita et al., 2025), perhatian terhadap kontribusi anggaran terhadap kesejahteraan sosial dan dampak lingkungan masih minim. Penelitian ini berusaha untuk memasukkan dimensi sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari penilaian kinerja anggaran sektor publik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih holistik terkait sejauh mana anggaran pemerintah tidak hanya efisien dalam penggunaan biaya, tetapi juga membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan kondisi lingkungan.

Sebagai contoh, meskipun pengelolaan anggaran di Kabupaten Dairi (2023-2024), menunjukkan efisiensi yang baik, hasil analisis ini menekankan pentingnya memperhitungkan faktor sosial dan lingkungan dalam evaluasi kinerja anggaran (Matondang et al., 2025). Pendekatan ini mencerminkan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada efisiensi biaya, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, dampak sosial dan lingkungan, yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam banyak studi, dimasukkan ke dalam penelitian ini untuk membuat pengukuran yang lebih komprehensif yang sesuai dengan tuntutan sektor publik saat ini.

Namun, ada masalah ketidakefisienan yang signifikan di beberapa daerah seperti Desa Tembokrejo dan Kabupaten Nabire, yang mana pengeluaran melebihi anggaran yang telah diatur, mengarah pada pemborosan anggaran (Hadaryen & Sugiartono, 2021). Ketidakefisienan ini mengindikasikan bahwa meskipun aspek ekonomi dikelola dengan baik, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai pengelolaan anggaran yang lebih efisien.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi titik utama dalam penerapan Value for Money (VfM), yang menilai sejauh mana anggaran yang dibelanjakan menghasilkan hasil yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Di Kabupaten Sinjai (2021-2023), hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, dimana pengeluaran melebihi pendapatan yang diterima, meskipun rasio ekonomi menunjukkan performa yang baik. Ini mencerminkan terjadinya pemborosan dalam pemanfaatan anggaran, karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapat, dan mengurangi efektivitas penggunaan anggaran (Anita et al., 2025). Di sisi lain, daerah seperti Desa Polanharjo dan BNN Provinsi Gorontalo (2018-2020) menunjukkan cara pengelolaan anggaran yang efisien, dengan pengeluaran yang cocok dengan hasil yang dihasilkan, mencerminkan pengelolaan anggaran yang maksimal (Agustin Sri Lestari et al., 2024) (Regisof Mega Wahiji et al., 2022).

Pada aspek efektivitas, Value for Money (VfM) menegaskan bahwa anggaran yang dikeluarkan perlu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di BNN Provinsi Gorontalo dan Kantor Imigrasi Pangkalpinang, hasil pencapaian tujuan terbilang sangat baik, berkat pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif (Regisof Mega Wahiji et al., 2022) (Maharani & Sari, 2021). Namun, hasil penelitian di Kabupaten Sinjai dan Desa Tembokrejo mengungkapkan bahwa meskipun menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang rendah, tidak mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien belum cukup tanpa disertai dengan pencapaian tujuan yang sesuai (Anita et al., 2025).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Agustin Sri Lestari et al., 2024), yang menganalisis dampak dari efektivitas, efisien, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Polanharjo terhadap kinerja pemerintah desa secara keseluruhan dan terpisah menemukan bahwa, dengan nilai signifikansi yang sangat rendah ($p\text{-value} < 0,05$), efektivitas dan efisiensi dan transparansi secara langsung mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Ini menunjukkan bahwa ketiga komponen ini sangat penting untuk penggunaan dana untuk mencapai hasil yang diinginkan (Agustin Sri Lestari et al., 2024).

Namun, dalam penelitian (Melta Idrika et al., 2023) yang berfokus pada pengukuran Value for Money pada APBDes Desa Sungai Bengkal Barat, ditemukan bahwa kinerja keuangan desa ini adalah ekonomis pada tahun 2018, 2019, dan 2021, sementara tahun 2020 dianggap tidak ekonomis. Dalam hal efisiensi, desa ini menunjukkan kinerja yang efisien pada tahun 2018, 2019, dan 2021, tetapi kembali dianggap tidak efisien pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja efisiensi dan ekonomi dapat dicapai dalam beberapa tahun, tetapi faktor-faktor ini dapat dipengaruhi oleh hal-hal di luar atau perubahan kondisi, yang dapat menyebabkan pengelolaan anggaran tidak optimal pada tahun tertentu (Melta Idrika et al., 2023). Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif dan ekonomis membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, sehingga dapat memungkinkan perubahan dan penyesuaian yang tepat sesuai dengan dinamika dan kebutuhan sektor publik.

Selain itu, elemen transparansi dan akuntabilitas juga sangat krusial dalam penerapan Value for Money. Penelitian di Desa Lokasari mengindikasikan bahwa walaupun akuntabilitas keuangan sudah memadai, masih terdapat kebutuhan untuk perbaikan dalam pengawasan dan kontrol anggaran agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran akan memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan bahwa pengeluaran yang selaras dengan perencanaan serta dapat dipertanggungjawabkan (Bintang et al., 2024)..

Terakhir, hasil dari Dinas “X” menunjukkan bahwa meskipun anggaran meningkat pada tahun 2020-2021, tidak ada peningkatan kinerja yang signifikan, yang menandakan bahwa pengelolaan anggaran yang lebih efektif sangat diperlukan. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan anggaran, perbaikan dalam manajemen program dan evaluasi sangat penting untuk mencapai peningkatan kinerja yang nyata (Wakhid Yuliyanto et al., 2023).

Secara keseluruhan, penerapan pendekatan Value for Money (VfM) memiliki peran yang sangat penting dalam menilai kinerja sektor publik. VfM menyediakan suatu kerangka kerja yang menyeluruh untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran dengan mempertimbangkan indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Metode ini tidak hanya berfokus pada analisis biaya, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana hasil yang dicapai selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah dapat memanfaatkan Value for Money (VfM) untuk mengidentifikasi area-area dalam pengelolaan anggaran yang memerlukan perbaikan, serta untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan cara yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. sebagai contoh, meskipun beberapa daerah telah mencapai kemajuan ekonomi, banyak di antaranya yang masih menghadapi tantangan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Oleh karena itu, penerapan VfM yang lebih konsisten dan mendalam dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja sektor publik secara keseluruhan.

Dengan semakin tingginya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, penerapan Value for Money (VfM) menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran publik benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui penerapan prinsip VfM yang efektif, kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Dengan demikian, Value for Money (VfM) bukan hanya sekedar alat untuk mengevaluasi kinerja sektor publik, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan anggaran mereka. Penerapan prinsip VfM diharapkan dapat menciptakan sektor publik yang lebih transparan, efisien, dan efektif dalam menjalankan fungsinya untuk kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan pendekatan Value for Money (VfM) dalam manajemen sektor publik adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan dengan cara yang efisien, efektif, dan ekonomis, bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Meskipun beberapa wilayah di Indonesia telah berhasil dalam pengelolaan anggaran yang baik, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mencapai efisiensi dan efektivitas optimal, dengan banyak daerah mengalami masalah pemborosan anggaran dan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Diharapkan, penerapan prinsip-prinsip Value for Money (VfM) yang lebih konsisten dan mendalam dapat memperbaiki pengelolaan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan menjamin bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana. Secara keseluruhan, dengan penerapan Value for Money (VfM), sektor publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Sri Lestari, Rukmini, & Utami, W. B. (2024). Analisis Pengaruh Efektivitas, Efisiensi, dan Transparansi Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Polanharjo. 1(4), 124–132.
- Akyani, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018- 2022 Melalui Pendekatan Value For Money.
- Anita, Nirwana, & Darmawati. (2025). Analisis Kinerja Pemerintah Kabupaten Sinjai Menggunakan Value for Money. 06 NOMOR 0(06), 7–13.
- Bintang, K., Dewi, R., Nyoman, D., & Werastuti, S. (2024). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Melalui Pengukuran Value for Money untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(3), 385–401.
- Budiyanto, E. (2012). Analisis Value For Money Audit Atas Anggaran dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.
- Hadaryen, Y. A., & Sugiartono, E. (2021). Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa dengan Menggunakan Konsep Value for Money (Studi kasus pada Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(2), 134–140.
- Maharani, Y., & Sari, R. (2021). Konsep Value For Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(1), 97. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i1.1919>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Matondang, K., Parawanza, A. A., Simanjuntak, J. P., & Tampubolon, Y. (2025). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value Of Money Di Kabupaten Dairi Pada Tahun 2023 Dan 2024. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 2, 1–10.
- Melta Idrika, Novi Mubyarto, & Efni Anita. (2023). Analisis Pengukuran Value for Money Pada Apbdes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i1.363>
- Regisof Mega Wahiji, T., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 335–344.
- Sitorus, S. R., & Siregar, S. (2023). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan Berdasarkan Konsep Value For Money. 8(2), 61–68.
- Wakhid Yuliyanto, Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan “Value For Money” Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas “X” di Sektor Publik. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 233–245. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1183>
- Wulansari, R. N. (2016). Pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Melalui Pendekatan Value For Money Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun Anggaran 2021-2023.